

Peran Pemerintah Dalam Program Jihad Rawat Kali Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo

Ima Duddin¹, Junita Risma Wanti², Anggita Rahma Fadlila³, Muhamad Ragiel Yudha Setiawan⁴, Tukiman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
E-mail: 22041010068@student.upnjatim.ac.id¹, 22041010101@student.upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 03 Juni 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords: Peran

Pemerintah, Pengelolaan
Lingkungan, Jihad Rawat
Kali

Abstract: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sungai dalam rangka menanggulangi bencana banjir. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali yang merupakan langkah dalam normalisasi lingkungan sungai di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam Program Jihad Rawat Kali dan keberlanjutannya di Desa Bluru Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah dalam pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali sebagai inisiatif pengelolaan lingkungan sungai di Desa Bluru Kidul. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokus utama kajian meliputi empat peran pemerintah, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih belum maksimal sebagai regulator karena belum adanya regulasi khusus, cukup berhasil sebagai dinamisator walaupun penyebaran informasi belum merata, aktif sebagai fasilitator meskipun terdapat keterbatasan alat berat, serta berperan sebagai motivator dengan kampanye edukasi dan apresiasi, tetapi partisipasi masyarakat masih membutuhkan penguatan kesadaran kolektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dapat diartikan sebagai suatu pembangunan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini, namun juga berupaya untuk tidak mengganggu kemampuan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan (SDGs) menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Delfirman, 2024). Sustainable Development Report 2024, Indonesia berada pada peringkat 78 dari 166 negara, pencapaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan

rumah yang signifikan dalam implementasi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sachs et al., 2024). Salah satu tantangan terbesarnya ada pada indikator SDGs 11, yaitu bertujuan mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan termasuk mitigasi risiko, menunjukkan status stagnan.

Kondisi risiko bencana banjir di Sidoarjo masih terbilang tinggi, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor dari lokasi pemukiman, sungai, curah hujan, dan sampah. Desa Bluru Kidul merupakan contoh nyata adanya tantangan ekologis. Di desa ini masih terdapat tumpukan sampah rumah tangga dan eceng gondok yang terbawa arus, dan menyumbat aliran air sehingga berhenti bawah jembatan, akibatnya air sungai macet dan menyebabkan meluap. Fenomena tumpukan sampah dan vegetasi liar seperti eceng gondok tidak hanya memperburuk kualitas air, tetapi juga menjadi indikator minimnya intervensi berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan persoalan teknis drainase, tetapi juga lemahnya kesadaran lingkungan masyarakat, serta belum optimalnya peran negara dalam melakukan pendekatan preventif dan edukatif.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Program Jihad Rawat Kali merupakan salah satu program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa kerja bakti yang dilakukan dengan tujuan membersihkan sungai-sungai dari sampah sebagai upaya pencegahan banjir. Dalam realisasi Program Jihad Rawat Kali ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo, anggota kodim hingga masyarakat (KOMINFO Sidoarjo, 2025). Inisiatif ini menggambarkan bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat langsung dan partisipatif. Meskipun Program Jihad Rawat Kali dinonarasikan dengan semangat kolektif untuk menanggulangi masalah lingkungan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sebuah problematika yang berasal dari segi partisipasi masyarakat.

Salah satu batasan utama adalah masih rendahnya peran warga sebagai aktor aktif dan sukarela. Masyarakat di mayoritas hanya mengikuti saja karena adanya ajakan atau instruksi dari kelurahan pemerintahan aparat, bukan karena kesadaran pribadi akan pentingnya menjaga sungai sebagai integritas lingkungan hidup mereka. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana peran pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menginisiasi, memfasilitasi, memotivasi dan mendorong partisipasi lintas aktor secara berkelanjutan. Tujuannya untuk memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat implementasi program, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara global melalui laporan *Our Common Future* oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 (Afidah, 2022), yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan degradasi lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Menurut Keiner (Pertiwi, 2017), pembangunan berkelanjutan merupakan upaya dalam menjamin terpenuhinya kondisi kehidupan yang bermartabat dengan menghormati hak asasi manusia melalui penciptaan dan pemeliharaan akses serta alternatif dalam perencanaan pola hidup secara luas. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang progresif, diperlukan 3 (tiga) syarat kelanjutan, antara lain kelanjutan secara

ekologi, sosial, dan ekonomi (Asdak, 2018).

Tata Kelola Lingkungan

Definisi tata kelola lingkungan secara umum mencakup kegiatan manusia dalam mengelola dan mempengaruhi lingkungan alam, termasuk pengelolaan sumber daya seperti tanah, air, udara, dan hutan. Namun esensi dari tata kelola lingkungan adalah kegiatan mengatur, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Permata, 2024). Tata kelola lingkungan memiliki cakupan luas selain menjaga kelestarian sumber daya alam, namun juga mewujudkan keadilan, politik, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada lingkungan.

Peran Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Sedangkan Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) menjelaskan bahwa peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi peran mencerminkan serangkaian perilaku yang diharapkan dan diatur oleh jabatan atau posisi sosial tertentu.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dengan kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Fungsi ini menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya. Adapun peran pemerintah (Arif, 2012) yang terbagi menjadi 4 peran, antara lain peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang menjadi arah penyelenggaraan pembangunan; dinamisator, pemerintah menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam stagnasi penyelenggaraan pembangunan; fasilitator, pemerintah menjadi jembatan antara berbagai kepentingan dan menciptakan lingkungan pelaksanaan pembangunan yang kondusif; dan motivator, pemerintah menjadi pemberi semangat kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam penyelenggaraan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali di Desa Bluru Kidul. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena dinilai sesuai untuk menggali informasi kompleks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, terutama mengenai perilaku, makna, serta interaksi antar pelaku yang terlibat dalam program. Lokasi penelitian adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan karena Desa Bluru Kidul merupakan salah satu wilayah yang rentan banjir, dimana lokasi geografisnya yang diapit oleh dua sungai. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Februari hingga April 2025.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada empat aspek peran pemerintah (Arif, 2012) dalam Program Jihad Rawat Kali, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, berita dari Kominfo Sidoarjo, laporan kegiatan program, serta literatur ilmiah terkait pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Informan ditentukan secara purposive dengan kriteria meliputi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, aparatur Desa Bluru Kidul yang terlibat langsung dalam koordinasi program, tokoh masyarakat, warga yang rutin mengikuti kegiatan Jihad Rawat Kali, serta anggota TNI dan OPD yang aktif dalam pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan format semi-terstruktur, guna memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara lebih leluasa. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap jalannya kegiatan Jihad Rawat Kali untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keterlibatan aktor, dinamika interaksi, serta proses pelaksanaan program di lapangan. Dokumentasi turut dikumpulkan sebagai pelengkap data, yang mencakup foto kegiatan, surat tugas, agenda resmi program, hingga materi visual dari media sosial dan laman resmi pemerintah. Proses analisis data menggunakan pendekatan interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Pada tahap reduksi data, informasi yang terkumpul diseleksi dan difokuskan hanya pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk menjaga keutuhan makna. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan pola dan temuan yang konsisten sepanjang proses pengumpulan dan analisis data. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode, serta dilakukan *member checking*, yakni mengonfirmasi temuan awal kepada para informan guna memastikan akurasi dan kesesuaian makna (Sugiyono, 2007). Strategi ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak hanya valid secara akademis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan praktik pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi komunitas di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator (Arif, 2012) memiliki arti bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam pembuatan peraturan daerah sebagai dasar atas pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator yang berwenang dalam menerbitkan dan menetapkan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pembangunan, pemerintah berfungsi mengarahkan dan menyeimbangkan pelaksanaan program melalui regulasi yang jelas dan terstruktur. Sehingga peran pemerintah sebagai regulator haruslah tercermin dalam pelaksanaan Program jihad Rawat Kali di Desa Bluru Kidul.

Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan program Jihad Rawat Kali melalui peraturan umum seperti Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019, masih belum tersedia regulasi khusus yang secara resmi mengatur berjalannya Program Jihad Rawat Kali. Kondisi ini menyebabkan penyebaran informasi yang tidak merata dan koordinasi antar pihak yang kurang optimal. Namun, pemerintah masih tetap menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan OPD, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Koramil, dan perangkat Desa Bluru

Kidul melalui jalur formal, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu dan melibatkan semua pihak sesuai dengan perannya masing-masing.

Sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten dan desa sudah menunjukkan hasil positif dalam keberhasilan program, terutama dalam hal koordinasi. Meski demikian, kendala regulasi yang belum spesifik dan eksplisit dalam mengatur Program Jihad Rawat Kali masih menjadi hambatan dalam penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi yang resmi dalam mengatur pelaksanaan dan penyebaran informasi Program Jihad Rawat Kali agar keberlanjutan dan efektivitas program dapat lebih optimal di masa mendatang.

Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam Program Jihad Rawat Kali di Desa Bluru Kidul sangat menonjol, terutama dalam fungsinya sebagai penggerak utama keterlibatan masyarakat dan berbagai stakeholder dalam upaya pelestarian sungai. Pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa, tidak hanya bertugas menjalankan program, tetapi juga mendorong lahirnya partisipasi aktif warga dan institusi lain agar tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan. Dalam teori peran pemerintah (Arif, 2012) menyebutkan bahwa peran dinamisator mencerminkan upaya pemerintah untuk menggerakkan dan memelihara semangat perubahan sosial, yang dalam konteks ini diarahkan pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam Program Jihad Rawat Kali tampak melalui usaha mereka membangun berbagai pihak, dari aparat desa, perwakilan masyarakat, hingga OPD yang relevan, dengan rapat koordinasi sebelum kegiatan mulai dilaksanakan. Di rapat ini didiskusikan teknis pelaksanaan, pengaturan lokasi, hingga pembentukan tim kecil yang dikomposisikan dari unsur dinas, desa, dan warga untuk memantau, mengevaluasi, serta menangani masalah yang timbul di lapangan. Komunikasi antar anggota tim disusun flexibel dengan menggunakan saluran seperti grup WhatsApp, sehingga informasi tiba-tiba dapat cepat dikirim dan ditamatkan.

Di tingkat desa, pemerintah melakukan penyelenggaraan penyebaran hasil rapat kepada masyarakat melalui ketua RT dan RW yang kemudian menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp lingkungan. Walaupun metode ini relatif efektif untuk sebagian warga, masih ada kesempitan akses untuk warga yang tidak aktif pada jalur komunikasi digital, sehingga penyebaran informasi belum merata. Di sisi lain, unsur Koramil juga berperan dalam edukasi secara langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan pentingnya memelihara kebersihan sungai bukan hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan, pencegahan banjir, dan kualitas hidup bersama. Secara keseluruhan, sinergi pemerintah sebagai dinamisator pada tingkat kabupaten dan desa telah berjalan, terbukti dari suksesnya koordinasi lintas sektor dan usaha sosialisasi kepada masyarakat. Namun, masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, terutama dalam memperluas jangkauan informasi secara langsung dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan perbaikan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat berkembang lebih aktif dan sadar, sehingga keberlanjutan program dan dampak positif bagi lingkungan makin terjamin.

Fasilitator

Program Jihad Rawat Kali di Desa Bluru Kidul menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menanggapi masalah lingkungan, khususnya dalam pengendalian aliran sungai dan pencegahan banjir. Pemerintah di sini berperan sebagai fasilitator utama yang mendorong program menuju pembangunan yang terorganisasi dan efisien. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan

pembangunan daerah (Arif, 2012). Peran fasilitator pemerintah sangat penting karena dapat memimpin koordinasi antar pemangku kepentingan, mobilisasi sumber daya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai keberlanjutan lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo tampil sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program ini. Selain menyiapkan perencanaan teknis, dinas ini turut menyediakan alat berat dan relawan untuk kegiatan bersih-bersih dan normalisasi sungai. Keterlibatan langsung di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan secara terpadu dan kolaboratif. Pemerintah Desa Bluru Kidul juga berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan teknis dan partisipasi masyarakat. Aparatur desa memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, mengerahkan relawan, bahkan turut serta secara langsung dalam kegiatan bersih-bersih. Dukungan moral dan keterlibatan aktif dari pemerintah desa semakin menguatkan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, warga TNI juga turut berpartisipasi dalam program ini dengan mengerahkan personel dan peralatan manual seperti cangkul dan sekop untuk membantu membersihkan sungai. Meskipun program ini sudah menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaannya masih terkendala dengan minimnya alat berat yang tidak selalu tersedia karena harus digunakan bersamaan dengan kebutuhan dinas lainnya. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak swasta sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan peralatan dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan lingkungan di tingkat desa.

Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator yang mana berarti merupakan salah satu bagian yang penting dalam kesuksesan program jihat rawat kali. Memberi semangat, dukungan, himbauan kepada masyarakat setempat, agar ikut melaksanakan program jihat rawat kali. Dalam teori peran pemerintah sebagai motivator (Arif, 2012), pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif. Pemerintah memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan bersama dalam menjaga lingkungan. Dalam Program Jihat Rawat Kali, Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Pemkab memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyebarkan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kali.

Selain itu, pemerintah daerah, Koramil sudah berperan sebagai motivator dengan teladan langsung di lapangan. Koramil tidak hanya terlibat langsung dalam kegiatan pembersihan sungai, tetapi juga melakukan pendidikan masyarakat, khususnya warga bantaran sungai, agar tidak membuang sampah sembarangan. Peran teladan ini semakin menguatkan semangat warga untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Dukungan lain ditunjukkan melalui pemberian konsumsi bagi para peserta kegiatan sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah kecamatan juga turut berperan dalam pelaksanaan di tingkat desa, sedangkan masyarakat memberikan bantuan secara sukarela berupa makanan ringan. Kolaborasi ini menunjukkan adanya semangat gotong royong yang memperkuat partisipasi dalam program. Meski sinergi pemerintah sebagai motivator telah berdampak positif terhadap keberhasilan program, hal ini belum sepenuhnya menjamin partisipasi jangka panjang dari masyarakat. Keberlanjutan program memerlukan kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat yang konsisten. Oleh karena itu, motivasi dari pemerintah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat terdorong untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meminimalisir bencana banjir yang terjadi di Sidoarjo terbukti secara nyata dalam implementasi Program Jihad Rawat Kali yang diadakan di titik-titik aliran sungai yang berpotensi terjadinya banjir. Ada pun peran pemerintah yang terjadi dalam Program Jihad Rawat Kali di Bluru Kidul, antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator kurang berperan karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit Program Jihad Rawat Kali, sehingga penyebaran informasi dan koordinasi antar pihak belum optimal.
2. Pemerintah sebagai dinamisator berhasil mendorong partisipasi masyarakat dan para stakeholder melalui rapat koordinasi, tetapi penyebaran informasi belum menjangkau seluruh warga karena keterbatasan media dan pendekatan.
3. Pemerintah sebagai fasilitator telah menunjukkan peran aktif dengan menyediakan sarana, prasarana, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan. Namun, keterbatasan alat berat menjadi kendala utama dalam efektivitas kegiatan.
4. Pemerintah sebagai motivator telah menunjukkan adanya upaya untuk membangkitkan semangat masyarakat melalui kampanye edukasi, dan edukasi, tetapi partisipasi masyarakat tetap dibarengi kesadaran kolektif dan pembinaan berkelanjutan.

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali di Desa Bluru Kidul, yakni:

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi resmi dalam mengatur pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali guna mewujudkan keberlanjutan dan keberhasilan program secara optimal dan menyeluruh.
2. Diperlukan perluasan jangkauan sosialisasi secara langsung sekaligus peningkatan literasi digital masyarakat agar informasi dapat diterima dengan baik oleh para warga Desa Bluru Kidul.
3. Pemerintah sebaiknya menjalin hubungan kerja sama dengan sektor swasta dalam kemudahan akses penggunaan alat berat, sehingga pengelolaan lingkungan di Desa Bluru Kidul dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Kampanye edukasi harus dioptimalkan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media sosial maupun media konvensional seperti pengumuman di masjid, balai desa, dan acara kemasyarakatan, sehingga dapat menjangkau semua kelompok masyarakat Desa Bluru Kidul, terutama warga yang belum terbiasa menghadapi teknologi informasi.

DAFTAR REFERENSI

- Afidah, Nurul, Febriana Roikhatul Janah. (2022). Analisis Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. https://www.researchgate.net/publication/366215451_Analisis_Pengaruh_Pembangunan_Berkelanjutan_Terdapat_Aspek_Lingkungan_Ekonomi_dan_Sosial_Budaya_Masyarakat_Pesisir
- Arif, 2012. *Konsep Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Asdak, C. (2018). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Tim UGM Press.
- Delfirman, A. (2024). *Sustainable Development Goals: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- KOMINFO Sidoarjo. (2025). *Laporan Kegiatan Jihad Rawat Kali*. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo.

-
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Jakarta: UI Press.
- Permata, S. (2024). *Tata Kelola Lingkungan : Panduan Praktis untuk Mengelola Sumber Daya Alam*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Pertiwi, D. M. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta:Grafindo.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2024). *Sustainable Development Report 2024*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Iyas. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.